

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa konstruksi merupakan salah satu problematika dalam perkembangan hukum di Indonesia yang menuntut keteraturan hukum dikarenakan kompleksitas persoalannya. Persoalan-persoalan yang kompleks tersebut menyangkut peranan berbagai subjek hukum dalam proses pelaksanaan jasa konstruksi.¹ Kecenderungan untuk melakukan penyimpangan di dalam persoalan jasa konstruksi atau pada proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Indonesia menjadi sesuatu yang patut dicermati. Selain itu, penerapan hukum yang tepat dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi menjadi titik tolak utama bagaimana penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim di Indonesia menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi.²

Di dalam konsep jasa konstruksi dikenal adanya kontrak kerja konstruksi yang merupakan landasan bagi penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. Kontrak kerja ini menjadi fokus dalam mengadakan suatu kegiatan jasa konstruksi, dikarenakan substansi kontrak yang memuat kepentingan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk membuat kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai para pihak yang memuat secara jelas, rumusan pekerjaan yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, masa pertanggung jawaban dan/atau pemeliharaan yang memuat tentang jangka waktu

¹ journal.usm.ac.id/jurnal/humani/663/detail

² G. Kartasapoetra, dkk., *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 17

pertanggungan, tenaga ahli yang memuat ketentuan tentang jumlah klasifikasi dan kualifikasi, hak dan kewajiban yang memuat tentang hak pengguna atau pemberi jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, cara pembayaran yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran, cidera janji yang memuat ketentuan tentang tanggungjawab kewajiban sebagaimana yang sudah diperjanjikan, penyelesaian perselisihan yang memuat ketentuan tentang penyelesaian perselisihan ketidaksepakatan, pemutusan kontrak kerja konstruksi yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi, keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul diluar kemauan dan kemampuan para pihak, kegagalan bangunan yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa atau pengguna jasa, perlindungan pekerja yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan, aspek lingkungan yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan.³

Masalah jasa konstruksi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, di mana jasa konstruksi diberikan arti adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 angka 1). Kemudian yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan

³ Inti pasal 22 UU No. 18 Tahun 1999 Jasa Konstruksi

arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain (Pasal 1 angka 2). Sementara secara khusus, terdapat Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah, dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.⁴

Adapun alasan mengapa pengaturan jasa konstruksi itu dibuat yaitu untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan demi mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Kemudian untuk mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu guna mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi, jenis dan badan usaha konstruksi.⁵

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan dilakukan secara berencana, menyeluruh terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Pembangunan tersebut dilakukan bersama oleh instansi swasta dengan masyarakat. Seperti ketentuan yang

⁴ Salim.,*et.al.*, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hm. 79

⁵ <https://www.hukumproperti.com/.../aspek-hukum-jasa-konstruksi>

sudah diatur dalam UU No.18 Tahun 1999, Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan serta bentuk nyata dari pembangunan yang telah dilakukan oleh instansi swasta.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 pula, mengatur mengenai kontrak kerja konstruksi, sebagai landasan adanya hubungan antar subyek hukum pelaku jasa konstruksi atau pengadaan barang/jasa. Letak keterhubungan tersebut ada pada konsep perjanjian antar subyek hukum dalam proyek jasa konstruksi, pelaksanaan, dan pengawasan.⁶

Kontrak kerja konstruksi diartikan sebagai keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 angka 5). Sementara di dalam Pasal 1 angka 15, Keppres 80 Tahun 2003, Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.⁷

Pelaksanaan dari pembangunan tersebut disamping dilaksanakan oleh instansi swasta tapi juga melibatkan instansi swasta yang lain (Kontraktor) selaku sebagai penyedia jasa pemborongan bangunan, masyarakat dalam hal ini pihak swasta atau pengusaha dan kontraktor atau pemborong. Hubungan kerjasama dalam melaksanakan pembangunan tersebut lazim dilakukan dalam bentuk pemborongan, karena dengan menggunakan sistem pemborongan ini dirasakan akan lebih efektif dan efisien untuk mempercepat dalam mengadakan bangunan yang diperlukan.

⁶ Ibid hal 2

⁷ Inti ketentuan umum pasal 1 s/d 15 KEPPRES No. 80 Tahun 2003

Ada beberapa hal contoh kasus hasil penelitian terdahulu berupa penyimpangan dalam perencanaan kontrak kerja konstruksi yang berakibat kegagalan bangunan, seperti pembangunan jembatan Apung yang menghubungkan antar Kabupaten/kota belum sempat diresmikan sudah roboh.⁸ Kemudian kegagalan bangunan Rusunawa Oeba yang belum sempat digunakan/dihuni sudah mengalami kerusakan parah.⁹ Ini dikarenakan adanya ketidak setaraan antara pemberi jasa dan pengguna jasa dalam melakukan perjanjian kontrak kerja pembangunan tersebut. Dan akibatnya salah satu pihak dari pemberi jasa ataupun pengguna jasa mementingkan keuntungan diri sendiri dengan mengesampingkan ketentuan hukum yang sudah diberlakukan. Dari beberapa contoh kasus tersebut diatas ini akan menjadikan dampak keselamatan/ancaman bagi nyawa seseorang. Oleh karena itu untuk mengantisipasinya dibuatlah aturan hukum oleh pemerintah untuk para pemberi jasa ataupun pengguna jasa dalam hal kontrak kerja konstruksi khususnya dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

⁸ Khudzaifah Dimiyati, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, pdf, Surakarta:UMS,

⁹ S. Nasution, 2001, *Metode Research* (Penelitian Hukum), pdf. Jakarta: Bina Aksara, hal.113.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kontrak kerja antara PT. Indomarco Prismatama dengan CV. Rukun Usaha dalam pembangunan konstruksi ?
2. Bagaimana akibat hukumnya bila tidak terpenuhinya semua ketentuan yang ada pada pasal 22 UU No 18 Tahun 1999 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan perjanjian kontrak kerja konstruksi pembangunan toko swalayan antara PT. Indomarco Prismatama dengan CV. Rukun Usaha ditinjau dari UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
2. Mengetahui akibat hukumnya jika pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan toko swalayan antara PT. Indomarco Prismatama dengan CV. Rukun Usaha tidak memenuhi ketentuan yang ada pada pasal 22 UU No 18 Tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi penelitian yang sejenis dimana yang akan datang untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menambah wacana dalam ilmu hukum, khususnya dalam hukum perdata/bisnis yaitu mengenai perjanjian kontrak kerja konstruksi antara PT. Indomarco Prismatama dengan CV Rukun Usaha.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau sebagai pedoman bagi mahasiswa yang ingin mengambil penelitian yang sejenis di waktu yang akan datang mengenai perjanjian kontrak kerja konstruksi antara PT. Indomarco Prismatama dengan CV. Rukun Usaha.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi aparat penegak hukum

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi penegak hukum untuk memberikan sumbangan pemikiran, perihal perjanjian kontrak kerja konstruksi antara PT. Indomarco Prismatama dengan CV. Rukun Usaha.

2. Bagi Penyedia dan Pengguna Jasa Konstruksi

Penelitian ini dapat dijadikan penambahan wawasan dan pengetahuan serta memberikan jalan keluar bagi Penyedia ataupun Pengguna Jasa Konstruksi agar lebih merespon dan memperhatikan lebih perihal perjanjian kontrak kerja konstruksi antara PT. Indomarco Prismatama dengan CV. Rukun Usaha.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan gambaran ataupun wawasan bagi masyarakat pada umumnya mengenai proses bantuan hukum terhadap perjanjian kontrak kerja konstruksi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Kualitatif

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang mengedepankan fakta yang terjadi di masyarakat saat ini, penelitian ini dilakukan secara teratur dan mendalam terhadap suatu perusahaan atau gejala tertentu, yang dihubungkan dengan peraturan yang ada.¹⁰ Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder melalui studi kepustakaan

2. Metode Pendekatan Empiris/sosiologis

Dalam metode ini menggunakan metode pendekatan empiris/sosiologis, yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terdapat di dalam masyarakat.¹¹ Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk penyelesaian permasalahan yang mendasar baik mencakup hak asasi manusia perihal perjanjian kontrak kerja konstruksi antara PT. Indomarco Prismatama dengan CV. Rukun Usaha.

¹⁰ <https://riyanislawyer.files.pdf.com/metode-penelitian>

¹¹ <https://duniainformatikaindonesia.pdf.com/metode-pendekatan>

3. Jenis Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah segala bentuk informasi dan data yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam penelitian peneliti. Sumber data dalam penelitian ini, adalah :

a. Data Primer

Yaitu berupa hasil wawancara dengan Pengguna jasa/Pemberi jasa, keterangan atau informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.¹²

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, KEPPRES No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur, jurnal, artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

4. a. Teknik Pengumpulan Data Primer

1. Wawancara tentang kontrak kerja konstruksi, dengan :

- 1). Supervisor selaku pengguna jasa konstruksi
- 2). Direktur selaku pemberi jasa konstruksi

¹² <https://teorionline.pdf.com/metode-pengumpulan-data>

2. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data atau bahan-bahan resmi yang diperoleh dari objek penelitian salah satunya dengan mencatat atau menganalisa dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian luar biasa berdasarkan perundang-undangan.

3. Studi Internet

Studi Internet yaitu pengumpulan data-data dari sumber informasi media online dengan cara download, browsing atau searching berita, artikel dan karya tulis resmi di internet.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu mengumpulkan data-data atau sumber-sumber penelitian dengan cara mempelajari buku, jurnal, makalah, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data Primer dan Sekunder

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan “*deskriptif analisis*” yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh, untuk kemudian mengadakan analisis hukum terhadap data yang telah ada

berdasarkan hasil analisa yang ada untuk memecahkan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam sistematika hukum ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisanya. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan dengan buku panduan penulis skripsi yang terdiri dari :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini mengurai mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian-pengertian seputar perjanjian pada umumnya dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perjanjian pekerjaan yang membahas pengertian perjanjian pekerjaan, sifat dan bentuknya, Isi perjanjian hingga masalah yang terkait dengan adanya keadaan memaksa.

3. Bab III Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil yang diperoleh dari masalah yang telah dibahas yaitu mengenai perjanjian kontrak kerja konstruksi, faktor-faktor penyebab terjadinya implementasi pasal 22 UU No. 18 Tahun 1999.

4. Bab IV Penutup

Kesimpulan dan saran yang memuat uraian tentang kesimpulan umum dan saran yang berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang telah ada.

